

## **PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT KEMISKINAN DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**Liza Nurnaningsih, Wahyu Hidayat Riyanto, Dwi Susilowati**

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fkultas Eknomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Jl.Raya Tlogomas No.246 Malang, Indonesia

\* Corresponding author: [lizza.nurnaningsih@gmail.com](mailto:lizza.nurnaningsih@gmail.com)

<b>Artikel Info</b>	<b>Abstract</b>
<i>Article history:</i> Received 05 October 2019 Revised 23 October 2019 Accepted 07 November 2019 Available online 11 November 2019	<i>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh populasi pada indeks pembangunan manusia kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan pada indeks pembangunan manusia kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten / kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa populasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien 16.165. Sedangkan tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM dengan koefisien regresi sebesar -0,612 dan -0,352. Jadi variabel yang paling mempengaruhi HDI adalah jumlah populasi dengan koefisien regresi 16.165.</i>
<b>Keyword:</b> IPM; Jumlah Penduduk; Tingkat Kemiskinan; Jumlah Pengangguran	
JEL Classification	

### **PENDAHULUAN**

Kriteria penting dalam pembangunan adalah adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, sehingga pembangunan yang utama adalah pembangunan yang diutamakan pada manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan ukuran pembangunan manusia yang dikenal indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI).

Menurut Human Development Report (1990) dalam BPS (2014) menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat. Pada prinsipnya, pilihan manusia sangat banyak jumlahnya dan berubah setiap saat. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Apabila ketiga hal mendasar tersebut tidak dimiliki, maka pilihan lain tidak dapat diakses. Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapabilitas manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, penggunaan kapabilitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu luang, untuk tujuan produktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.

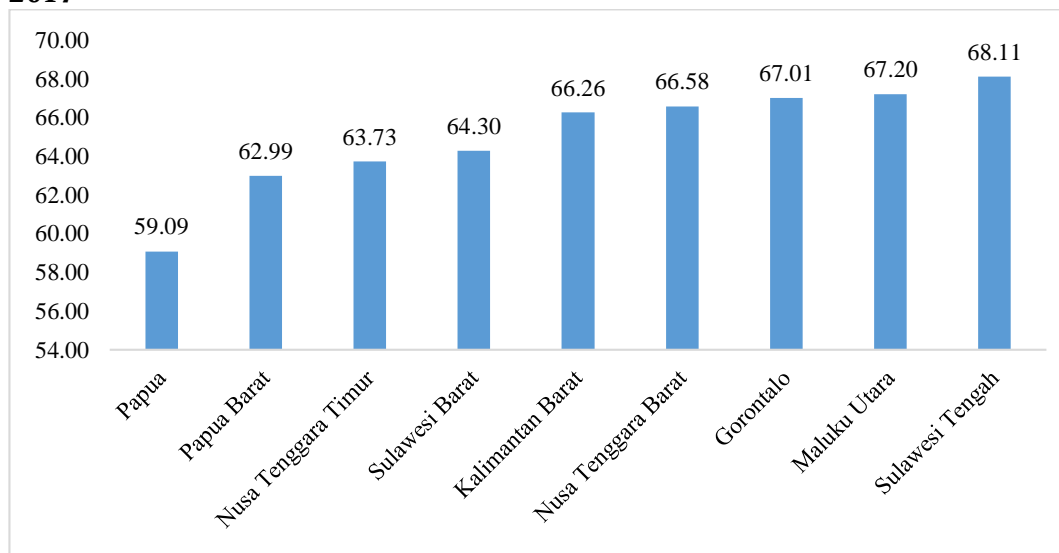
Terdapat empat pilar penting dalam IPM, pilar-pilar tersebut yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan

kemampuan daya beli. Upaya peningkatan IPM dalam suatu wilayah biasanya ditujukan pada empat pilar tersebut, namun seperti yang diketahui bahwa peningkatan dari masing-masing pilar guna meningkatkan IPM bukanlah hal yang mudah. Sehingga pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang mampu mempengaruhi peningkatan IPM tersebut.

UNDP (United Nations Development Programs) membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan. Penggolongan nilai IPM dengan satuan poin dengan nilai IPM < 50 merupakan tingkat dengan IPM rendah, selanjutnya IPM dengan poin 50 – 80 poin merupakan IPM dengan kriteria sedang atau menengah, kemudian IPM dengan poin diatas 80 poin merupakan IPM dengan kategori tinggi (UNDP, 2014).

Pada tahun 2017, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis daftar 9 provinsi dengan IPM terendah. Daftar 9 provinsi dengan IPM terendah tersebut dapat dilihat pada grafik berikut.

**Gambar 1. Daftar 10 Provinsi dengan IPM terendah di Indonesia Tahun 2017**



Sumber: BPS, Data diolah 2017

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempati urutan ke-enam sebagai provinsi yang memiliki IPM terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 66.58. Hal ini masih menjadi pekerjaan yang besar bagi pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebab keputusan kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (2015) menyatakan bahwa strategi pembangunan di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015-2019 difokuskan pada beberapa bidang Nawa Cita yaitu bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infra struktur dan ketahanan pangan. Namun berdasarkan laporan BPS tahun 2017, angka IPM di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih pada urutan ke-enam terendah. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tugas yang sangat berat guna peningkatan IPM di provinsi tersebut.

Faktor yang menyebabkan perlambatan laju pembangunan menurut Jhingan (2014:20) adalah pertumbuhan penduduk yang cepat dan bersamaan dengan tingkat kepadatan yang rendah dan kurangnya tingkat pemupukan modal yang akan berakibat buruk pada pertumbuhan ekonomi khususnya dalam perbaikan taraf hidup. Hal ini dikarenakan adanya ketidak sesuaian antara modal dan jumlah buruh (penduduk) yang terdapat dalam negara tersebut. Pertumbuhan penduduk yang cenderung cepat akan memperberat tekanan pada lahan, peningkatan pengangguran dan sulitnya pemenuhan fasilitas pendidikan dan sosial.

Faktor lain yang seringkali menghambat pembangunan adalah tingkat kemiskinan, Indeks pembangunan manusia (IPM) secara umum berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2010:70) bahwa adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal akan menyebabkan rendahnya produktivitas yang berakibat pada tingginya kemiskinan, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan akan menyebabkan terjadinya penurunan investasi yang berdampak pada kurangnya asupan modal dan akan kembali menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan dan ketertinggalan yang pada akhirnya akan memperlambat laju pertumbuhan pembangunan pada suatu negara.

Angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih tinggi, hal ini mendorong diadakan pertemuan khusus antara Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Gubernur Nusa Tenggara Barat dan jajaran Pemprov Nusa Tenggara Barat dalam rapat terbatas pada 21 Februari 2017 (Suara NTB, 2017). Berdasarkan permasalahan yang sangat penting untuk segera diselesaikan. Karena peningkatan angka kemiskinan, pengangguran serta Jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan peningkatan daya saing serta IPM akan berpengaruh buruk terhadap pembangunan di Nusa Tenggara Barat.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif desain penelitian studi kasus. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengembangkan teknik yang menghasilkan data dalam bentuk numerik atau angka. Menurut Sugiyono (2014:52), penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif dengan desain penelitian studi kasus ini dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **Metode Analisis Data**

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan data panel. Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Keterangan :

$Y_{it}$	: Indeks Pembangunan Manusia
$\beta_0$	: Konstanta / Intercept
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	: Koefisien Regresi Parsial
X1	: Jumlah Penduduk
X2	: Tingkat Kemiskinan
X3	: Jumlah Pengangguran
i	: Unit data
t	: Periode Waktu (tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
e	: Standar error

Sumber : (Sugiyono, 2010)

### **Pemilihan Model dalam Mengelola Data Panel**

#### a. Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui apakah objek penelitian memiliki ragam homogen atau tidak. Apabila objek penelitian memiliki ragam homogen maka model yang digunakan adalah Common Effect Model (CEM), namun tidak memiliki ragam yang homogen maka menggunakan model Random Effect (REM). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- Lagrange Multiplier < Chi Square tabel maka objek penelitian memiliki ragam homogen, sehingga menggunakan model Common Effect Model (CEM)
- Lagrange Multiplier > Chi Square tabel maka objek penelitian memiliki ragam tidak homogen, sehingga menggunakan model Random Effect (REM).

#### b. Chow Test

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode fixed effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy atau model common effect dengan melihat sum of residuals (RSS) (Nachrowi, 2006). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut :

- Probabilitas < alpha ( $\alpha = 5\%$ ) maka menggunakan model Fixed effect model
- Probabilitas  $\geq$  alpha ( $\alpha = 5\%$ ) maka menggunakan model Common Effect Model.

#### c. Hausman Test

Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel (Gujarati, 2012). Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Probabilitas < alpha ( $\alpha = 5\%$ ) maka menggunakan model Fixed effect model
- Probabilitas  $\geq$  alpha ( $\alpha = 5\%$ ) maka menggunakan Random Effect Model

1. Pengujian Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen dalam merepresentasikan variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diketahui melalui nilai adjusted R square pada output program Eviews. Koefisien determinasi (adjusted R square) yang dihasilkan oleh model regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen akan merepresentasikan seberapa besar variabel independen mampu memberikan kontribusi terhadap variabel dependen.
2. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)  
Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh variabel independen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan apabila statistik uji  $F \geq F$  tabel atau probabilitas  $\leq \alpha$  ( $\alpha=5\%$ ) maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)  
Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian menyatakan apabila statistik uji  $t \geq t$  tabel atau probabilitas  $\leq \alpha$  ( $\alpha=5\%$ ) maka terdapat pengaruh signifikan secara parsial (individu) variabel independen terhadap variabel dependen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan ratusan pulau-pulau kecil. Dari 280 pulau yang ada, terdapat 32 pulau yang berpenghuni. Luas Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 20.153,15 km<sup>2</sup>. Terletak antara 155° 46' - 119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan

Luas Pulau Sumbawa mencapai 15.414,5 km<sup>2</sup> (76,49%) atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan luas Pulau Lombok hanya mencapai 1/3 saja. Luas seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 49.312,19 km<sup>2</sup>. Pusat pemerintahan Nusa Tenggara Barat terdapat di Kota Mataram, Pulau Lombok. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 8 kabupaten, 2 kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram dan Kota Bima. Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten termuda, yang mengalami pemekaran dari kabupaten induknya, Lombok Barat, pada tahun 2008. Kabupaten Lombok Utara yang ibu kotanya berada di Tanjung memiliki 5 kecamatan dan 33 desa/kelurahan.

Persamaan pengujian pengaruh jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 1. Hasil Olah data Regresi**

Variabel	Koefisien	Std Error	T Statistic	Prob
Konstanta	-128,1103	37,06979	-3,455923	0,0010
Jumlah Penduduk	16,16461	2,793865	5,785752	0,0000
Tingkat Kemiskinan	-0,611839	0,083564	-7,321826	0,0000
Tingkat Pengangguran	-0,352407	0,219588	-1,604855	0,1141
<i>F</i> statistic	= 467,9308	R-squared	= 0,989951	
Prob	= 0,000	Adj, R-squared	= 0,987835	

Sumber: Eviews 9, data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 1. maka model atau persamaan empirik pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = -128,110 + 16,165 \chi_1 - 0,612 \chi_2 - 0,352 \chi_3$$

Dimana :

- Y : Indeks Pembangunan Manusia
- X1 : Jumlah Penduduk
- X2 : Tingkat Kemiskinan
- X3 : Jumlah Pengangguran

### Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat diketahui melalui koefisien determinasinya (adjusted R<sup>2</sup>) yaitu sebesar 0,988 atau sebesar 98,8%. Hal ini berarti keragaman Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 98,8%, atau dengan kata lain kontribusi Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 98,8%, sedangkan sisanya sebesar 11,2% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

### Pengujian Hipotesis

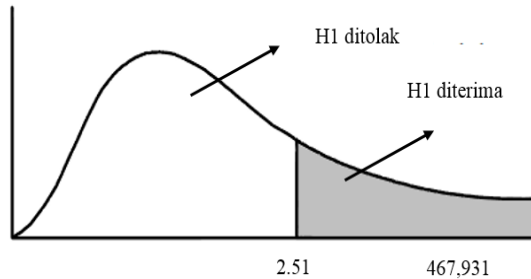
#### a. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas < *alpha* (0,05) maka terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai Fhitung = 467,931 dengan probabilitas 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < *alpha* (0,05) atau Fhitung (467,931) > Ftabel (2.51). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Grafik signifikansi uji simultan pengaruh jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan jumlah pengangguran terhadap IPM dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2. Uji Simultan (Uji F)**



b. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kriteria pengujian menyatakan jika probabilitas <  $\alpha$  (0,05) maka terdapat pengaruh yang signifikan secara individu Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil uji hipotesis parsial beserta nilai koefisien regresi pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

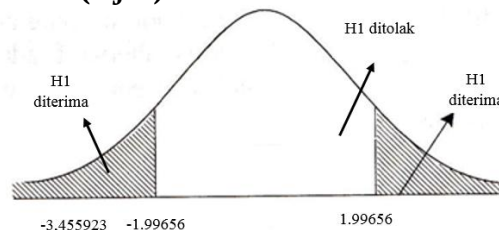
**Tabel 2. Hasil uji hipotesis parsial dan koefisien regresi**

Variabel	Koefisien	T Statistic	Prob
Konstanta	-128,1103	-3,455923	0,0010
Jumlah Penduduk	16,16461	5,785752	0,0000
Tingkat Kemiskinan	-0,611839	-7,321826	0,0000
Tingkat Pengangguran	-0,352407	-1,604855	0,1141

1. Uji Hipotesis Parsial Konstanta terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengujian hipotesis pada konstanta menghasilkan nilai thitung = -3,455923 dengan probabilitas 0,0010. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas <  $\alpha$  (0,05) atau thitung (-3,455923) > ttabel (1.99656). Sehingga dapat diartikan bahwa konstanta memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Grafik signifikansi uji parsial konstanta terhadap IPM dapat dilihat pada gambar berikut.

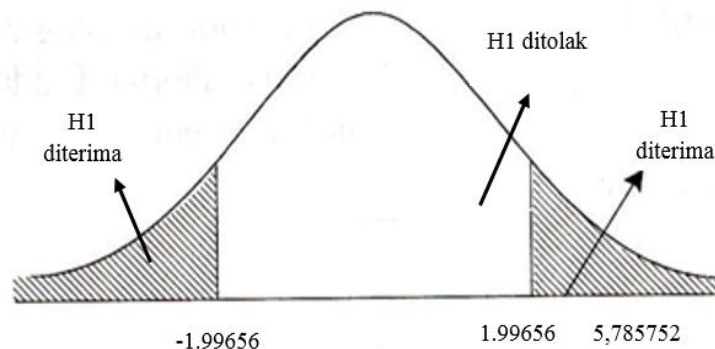
**Gambar 3. Uji Parsial (Uji t) Konstanta**



2. Uji Hipotesis Parsial Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pengujian hipotesis pengaruh jumlah penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menghasilkan nilai thitung = 5,785752 dengan probabilitas 0,0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < alpha (0,05) atau thitung (5,785752) > ttabel (1,99656). Sehingga dapat diartikan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Grafik signifikansi uji parsial pengaruh jumlah penduduk terhadap IPM dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 4. Uji Parsial (Uji t) Jumlah Penduduk**



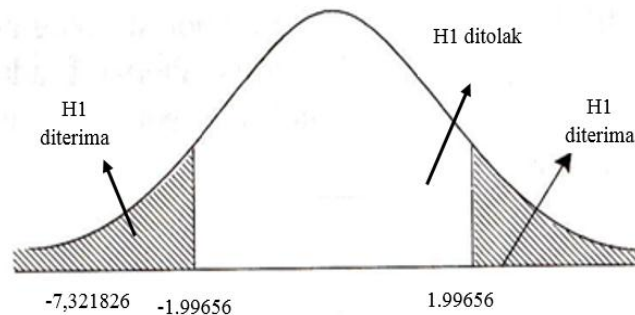
Koefisien jumlah penduduk sebesar 16,165 mengindikasikan bahwa Jumlah penduduk berpengaruh positif dan peningkatan jumlah penduduk sebanyak 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 16,165 poin, dengan peningkatan IPM yang besar atau nyata (signifikan). Jumlah penduduk yang berpengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa teori jumlah penduduk pada suatu wilayah akan berdampak positif atau berpotensi dalam mengembangkan perekonomian, sebagaimana pandangan optimis yang dikemukakan oleh Thomas et al (2001:66) bahwa penduduk adalah asset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan promosi inovasi teknologi dan institusional.

3. Uji Hipotesis Parsial Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengujian hipotesis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menghasilkan nilai thitung = -7,321826 dengan probabilitas 0,0000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < alpha (0,05) atau thitung (7,321826) > ttabel (1,99656). Sehingga dapat diartikan bahwa tingkat kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Grafik signifikansi uji pasial pengaruh tingkat kemiskinan terhadap IPM dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5. Uji Parsial (Uji t) Tingkat Kemiskinan

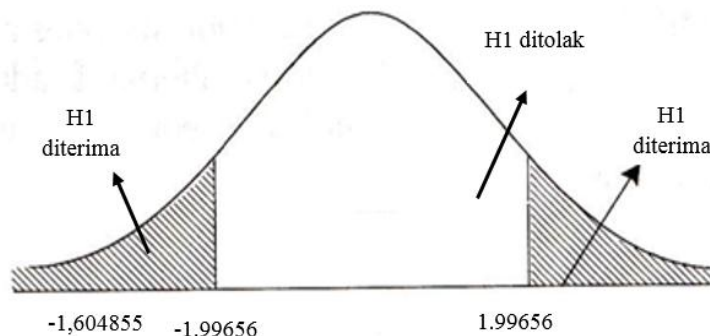


Koefisien tingkat kemiskinan sebesar  $-0,612$  mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti terjadinya peningkatan tingkat kemiskinan sebanyak 1% maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,612 poin, dengan penurunan IPM yang besar atau nyata (signifikan). Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Nurkse (1953) dalam Kuncoro (2010:70) bahwa tingkat kemiskinan akan berdampak negatif pada pembangunan, yang dimulai dengan adanya keterbelakangan dan kurangnya modal sehingga akan menyebabkan rendahnya produktivitas yang selanjutnya berdampak pada rendahnya pendapatan yang diterima.

4. Uji Hipotesis Parsial Jumlah Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pengujian hipotesis pengaruh jumlah pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menghasilkan nilai thitung =  $-1,604855$  dengan probabilitas  $0,1141$ . Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas  $< \alpha (0,05)$  atau thitung ( $1,604855$ )  $< t_{tabel} (1,99656)$ . Sehingga dapat diartikan bahwa jumlah pengangguran memiliki pengaruh yang tidak signifikan secara parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat pengaruh jumlah pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun dengan pengaruh kecil. Grafik signifikansi uji parsial pengaruh jumlah pengangguran terhadap IPM dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6. Uji Parsial (Uji t) Jumlah Pengangguran



Koefisien tingkat pengangguran sebesar  $-0,352$  mengindikasikan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini berarti terjadinya peningkatan tingkat pengangguran sebanyak 1% maka akan menurunkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,352 poin, meskipun penurunan tersebut tidak besar atau nyata (tidak signifikan).

Hasil tingkat pengangguran pada penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chalid dan Yusuf (2014), yang menghasilkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Riau. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budirahayu (2017) yang menghasilkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap IPM pada 33 Provinsi di Indonesia. Namun secara umum pengaruh peningkatan jumlah pengangguran di kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat akan berdampak negatif pada pembangunan. Sebagaimana disampaikan oleh Kuncoro (2010:45) bahwa beberapa dampak pengangguran terhadap pembangunan yaitu menyebabkan pendapatan nasional tidak optimal serta pendapatan pajak pemerintah berkurang. Sehingga pengangguran yang tinggi mengurangi kemampuan pemerintah menjalankan kegiatan pembangunan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan koefisien 16,165 poin. Hal ini menandakan apabila jumlah penduduk meningkat sebesar 1% maka IPM akan mengalami peningkatan sebesar 16,165 poin.
2. Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2017 dengan koefisien  $-0,612$  poin. Hal ini menandakan apabila tingkat kemiskinan meningkat sebesar 1% maka IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,612 poin.
3. Jumlah pengangguran berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2017 dengan koefisien  $-0,352$  poin. Hal ini menandakan apabila jumlah pengangguran meningkat sebesar 1% maka IPM akan mengalami penurunan sebesar 0,352 poin.
4. Variabel yang berpengaruh paling besar terhadap indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah jumlah penduduk dengan koefisien regresi 16,165 poin.

Dari hasil analisis dan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk pada Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2011-2017 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, sehingga perlu adanya peningkatan perekonomian dan pemberdayaan SDM yang terarah agar daya saing masyarakat sehingga akan terjadi peningkatan kesejahteraan.
2. Tingkat kemiskinan secara bertahap mengalami penurunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun setelah bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 diperlukan bantuan permodalan guna pemulihan perekonomian masyarakat.

Jumlah pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung fluktuatif. Dibutuhkan peningkatan daya saing masyarakat dan penggalan potensi daerah serta regulasi atau peraturan daerah yang berorientasi pada perluasan lapangan pekerjaan merupakan kunci dari pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Edisi pertama Yogyakarta: Graha Ilmu.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2015. *Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015 – 2019*. Mataram: BPKP NTB.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2016. *Nusa Tenggara Barat dalam Angka tahun 2016*. Lombok Timur: BPS NTB.

Baltagi, Badi H. 2001. *Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition*. United Kindom: John Wiley & Sons Ltd.

Budirahayu N. 2017. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 33 Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2015*. Program Studi Ekonomika Terapan. Sekolah Vokasi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Chalid N dan Yusuf Y. 2014. *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau*. *Jurnal Ekonomi*. Volume 22, Nomor 2 Juni 2014.

Ehrlich, Paul R. 1981. *Ledakan Penduduk (terjemahan)*. Jakarta: Gramedia.

Ghozali I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Eviews*. Semarang: BPF Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta. Erlangga.

*Human Development Report (HDR) 1990 dalam BPS*. 2014. *Indeks Pembangunan Manusia 2014*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Indriantoro, Nur, Bambang Supomo, 2009. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.

Jhingan M.L. 2014. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi keenambelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kuncoro M. 2010. Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Nachrowi D Nachrowi. 2006. Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan, Cetakan Pertama, Jakarta. Lembaga Penerbit FE UI.

Nurkse, Ragnar. 1953. Problems of Capital Formation in Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.

Laila C. 2016. Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat: Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar.

Saputra, Whisnu, Adhi. 2011. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB,

IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro.

Silalahi R. 2014. Pengantar Ekonomi Makro. Bandung: Cita Pustaka.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suara NTB. 2017. Presiden dan TGB Bahas Tingginya Angka Kemiskinan di NTB (<https://www.suarantb.com/ntb/2017/02/24996/presiden.dan.tgb.bahas.tingginya.angka.kemiskinan.di.ntb/>), diakses tanggal 19 oktober 2018

Sugianto. 2006. Value Added, ISSN 1693-3435 Vol.2, No.2, Maret – Agustus 2006. Semarang: Fakultas Manajemen Universitas Muhammadiyah Semarang.

Swaminathan, M.S. 2002. Building a National Nutrition Security System." Paper presented at India-ASEAN Eminent Persons Lecture Series, 1 Jan 2002. FAO, Bangkok: Thailand.

Thomas, Vinod, Mansoor Dahlami, Ashok Dharieswar, Daniel Kaufmannalin, Kishor Ramon Lopes, Yan Wang. 2001. The Quality of Growth (Kualitas Pertumbuhan). Jakarta: Gramedia.

United Nations Development Program. 2014. Human Development Report 2014. New York: United Nations Development Programme.

Zakaria R. 2017. Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016. Fakultas Manajemen. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.